

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan dan kerentangan pangan merupakan salah satu permasalahan ekonomi di Indonesia, kemiskinan merupakan permasalahan yang multi dimensional, ada banyak faktor yang melatar belakangi kemiskinan yaitu mencakup faktor ekonomi, sosial, politik dan budaya. Pendapat lain mengatakan bahwa ada dua kategori kemiskinan yaitu kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural terjadi akibat dari adanya karakter budaya dan etos kerja masyarakat yang lemah, sementara kemiskinan sruktural terjadi akibat dari terjadinya ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang timpang (Arif, 2000:289).

Penanganan program secara terpadu dan berkelanjutan adalah hal yang benar-benar diperlukan dalam penanganan kemiskinan, gambaran kemiskinan salah satunya dilihat dari kurangnya materi untuk mencakup kebutuhan pangan sehari-hari dan tempat tinggal. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tentunya tidak terlepas dari bahan kebutuhan pokok, dan dapat dikatakan hidupnya tergantung dari terpenuhinya kebutuhan pokok tersebut. Hal ini wajar karena dalam kehidupan sehari-hari masyarakat perlu mengonsumsi bahan kebutuhan pokok yang bermanfaat bagi tubuh, agar tetap dalam kondisi kecukupan gizi yang terjaga. Prioritas utama pembangunan adalah harus menyediakan bahan pangan terutama beras dalam jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau untuk keluarga miskin.

Masalah kemiskinan merupakan penghambat proses pembangunan dari suatu wilayah yang ada di Indonesia salah satu wilayah yang masih dililit oleh masalah kemiskinan adalah Kabupaten Indramayu. Kabupaten Indramayu masuk kedalam data penanggulangan kemiskinan ekstrim di Jawa barat.

Presentase penduduk miskin di Indramayu berdasarkan dari data pusat statistik (BPS) Kabupaten Indramayu bulan desember tahun 2021 sebagai berikut :

- Tingkat kemiskinan 12,70 % dengan jumlah penduduk miskin 220.310 jiwa.
- Dan tingkat kemiskinan ekstrimnya dengan 6,15 % dengan jumlah penduduk miskin ekstrim 106.690 jiwa

Dengan adanya presentasi kemiskinan yang ada di Indramayu maka upaya pemerintah mengusahakan agar semua masyarakat dapat memperoleh kesejahteraan, sesuai dengan pasal 34 ayat 2 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa “Negara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia” untuk mewujudkan keinginan dari pasal tersebut maka pemerintah telah melakukan upaya dalam memutus mata rantai kemiskinan dibidang pangan dengan mengeluarkan program sosial, salah satunya yaitu program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai. (lembar Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 156).

Masyarakat yang mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan masyarakat yang sudah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh operator Aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation

(SIKS-NG), yang kemudian ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya senilai Rp.200.000/KPM, melalui mekanisme akun elektronik berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang digunakan hanya untuk membeli kebutuhan bahan pangan, pemerintah telah bekerja sama dengan Himpunan Bank Negara (himbara) yang kemudian disebut e-warung (agen), nilai bantuan itu tidak bisa diuangkan namun bisa ditukar dengan bahan pangan melalui e-warung (agen) seperti beras, telur, dll.

Pada tahun 2022 telah terjadi perubahan dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berdasarkan keputusan Menteri Sosial, tertera dalam Juknis Keputusan Direktur Jendral Pangan Fakir Dan Miskin Nomor 29/6/Sk/Hk.01/02/2022 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial Program Sembako Periode Januari, Februari, Maret 2022. Bahwa BPNT akan diterima oleh KPM berupa uang tunai melalui kantor POS Indonesia kebijakan ini dikeluarkan melihat dari evaluasi penyaluran bantuan di berbagai wilayah.

Salah satu tujuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah untuk mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan masyarakat serta memberikan nutrisi seimbang kepada KPM. Hal ini menjadi acuan dan motivasi bagi pemerintahan Desa Telukagung Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu yang merupakan desa dengan jumlah 6 Rukun Warga (RW) dan 21 Rukun Tetangga (RT) dengan total 5.034 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 2.398 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 2.636 jiwa yang terdiri dari 1.743 kepala keluarga yang

didalamnya terdapat 902 keluarga prasejahtera, 669 keluarga sejahtera I, 90 keluarga sejahtera II, 56 keluarga sejahtera III, dan 26 keluarga sejahtera III *plus*. Dilihat dari jumlah keluarga prasejahtera Desa Telukagung memiliki data jumlah penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 1.297 KPM.

Berdasarkan hasil pengamatan dari data yang didapat, peneliti menemukan beberapa permasalahan mengenai implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Telukagung diantaranya seperti :

1. Belum tepatnya pendataan penerima BPNT karena masih banyak penerima yang dari keluarga mampu.
2. Belum tepatnya waktu dalam proses penyaluran BPNT di desa Telukagung.
3. Belum optimalnya penghapusan data masyarakat yang sudah meninggal maupun pindah daerah yang mengakibatkan penambahan jumlah penerima bantuan baru tidak optimal.

Hal-hal diatas berdampak negatif, baik bagi penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun masyarakat yang akan baru mengajukan bantuan. Dengan demikian peneliti ingin meneliti bagaimana pelaksanaan kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diterapkan di Desa Telukagung. Dengan judul penelitian “Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Telukagung Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan permasalahan, yaitu : “Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non

Tunai (BPNT) Di Desa Telukagung Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu belum optimal”.

1.3 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dilakukan oleh pemerintah Desa Telukagung Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Telukagung Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu ?
3. Upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Telukagung Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang ada di Desa Telukagung Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Telukagung Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu.

3. Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi hambatan Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Telukagung Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan mempunyai kegunaan yang baik agar penelitian yang telah dilakukan mempunyai manfaat bagi penulis dan juga orang lain yang membacanya.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Dari segi keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan keilmuan khususnya pada Ilmu Administrasi Publik.
- b. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal Implementasi suatu kebijakan bantuan sosial yang diterapkan disuatu wilayah atau Desa.
- c. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan bagi penelitian lanjutan dalam masalah yang sama.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pribadi

Sebagai ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis tentang implementasi kebijakan dalam penyaluran bantuan sosial khususnya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diterapkan di Desa Telukagung.

b. Bagi Pemerintah

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi lembaga atau instansi yang terkait terhadap implementasi

kebijaka dalam implementasi bantuan sosial khususnya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

1.6 Kerangka Pemikiran

1.6.1 Implementasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa implementasi berarti pelaksan atau penerapan. Kata implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang lakukan agar dapat mencapai tujuan tertentu. Implementasi juga sering disebut sebagai suatu proses rangkaian suatu kegiatan akan ditindak lanjutan setelah sebuah rencana dan kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan.

Secara timologis, implementasi dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan dengan penggunaan sarana untuk memperoleh hasil atau mencapai maksud yang diinginkan. Implementasi adalah sebuah proses interaksi antara penentuan tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi inti dasar suatu implementasi adalah “membangun hubungan” dan mata rantai agar supaya kebijakan bisa berpengaruh terhadap kebijakan (Nawi 2018).

Van Meter dan Van Horn (Nurdin, 2019:41) mendefenisikan secara eksplisit bahwa proses implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik perorangan atau kelompok swasta maupun publik yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.

1.6.2 Kebijakan Publik

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) kebijakan yaitu rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan dan cara bertindak, sedangkan publik yaitu orang yang banyak atau umum. Sesuai pendapat Easton (Taufiqurohman 2014: 03) yang mengemukakan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. James E. Anderson (Taufiqurohman 2014:04) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

1.6.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik merupakan upaya untuk merealisasikan suatu keputusan atau kesepakatan yang ditetapkan sebelumnya, implementasi kebijakan publik tidak hanya mencakup operasional kebijakan publik kedalam mekanisme birokrasi tetapi juga terkait dengan bagaimana agar kebijakan publik tersebut dapat diterima, dipahami dan didukung oleh kelompok sasaran. Hal ini merupakan bagian dari proses politik yang memperhatikan berbagai jaringan kekuatan politik, ekonomi, sosial yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat sehingga kebijakan itu dapat mencapai harapan yang diinginkan.

Keberhasilan implementasi kebijakan publik memerlukan pendekatan *top-down* dan *bottom-up* sekaligus pendekatannya berfokus pada ketersediaan unit pelaksana, standar pelaksana kewenangan, dan koordinasi. Serta menekankan pada strategi yang digunakan oleh pelaksana saat penentuan tujuan yang hendak dicapai

oleh suatu kebijakan sebagai dasar untuk memahami kebijakan itu keseluruhan. Menurut Edward III dalam Leo Agustino (2020:136-141) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi kebijakan antar lain yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Menurut Edward III Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan, informasi mengenai kebijakan perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan, menurut Edward III komunikasi kebijakan memiliki beberapa parameter antara lain :

1. Cara penyampaian kebijakan agar sebuah kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana atau implementor tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Kejelasan yaitu agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan mereka mengetahui maksud, tujuan dan sasaran serta substansi dari kebijakan tersebut sehingga masing-masing dapat mengetahui apa yang harus dipersiapkan untuk keberhasilan suatu kebijakan
3. Konsistensi yaitu agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan target grup dan pihak lain.

2. Sumber Daya

Edward III mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peran dalam keberhasilan implementasi, sumberdaya memiliki parameter sumberdaya manusia (staff), informasi, wewenang, fasilitas.

a. Staff

Komponen sumberdaya terdiri jumlah staf dan keahlian dari para pelaksana atau staf tersebut sumberdaya manusia yang tidak memadai baik dari segi jumlah maupun kemampuan akan berdampak pada tidak terlaksananya program secara efektif dikarenakan mereka tidak mampu melakukan pengawasan dengan baik. Dengan demikian, Jika jumlah personil pelaksana kebijakan terbatas maka upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kemampuan para pelaksana untuk menjalankan program kebijakan tersebut. Oleh sebab itu perlu adanya peningkatan manajemen sumber daya manusia yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program kebijakan

b. Informasi

Informasi disini menjelaskan bagaimana cara melaksanakan kebijakan dan apa yang harus para implementor lakukan disaat melakukan tugas yang diperintahkan

c. Wewenang

Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan.

d. Fasilitas

Fasilitas fisik merupakan bentuk sarana dan prasarana yang harus ada dalam proses implementasi kebijakan karena demi terselenggaranya pelaksanaan suatu kebijakan dan dipergunakan untuk mendukung secara langsung dan terkait dengan tugas-tugas yang ditetapkan

3. Disposisi Atau Sikap Dari Pelaksana Kebijakan

Faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya implementasi kebijakan ialah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan poin atau bagian isi dari kebijakan tersebut, maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami kesulitan bahkan akan menimbulkan banyak masalah. Disposisi memiliki 3 parameter yaitu :

a. Komitmen

Bentuk disposisi dari implementasi kebijakan adalah berupa Komitmen atau kesepakatan bersama dengan instansi terkait dalam menjaga stabilitas organisasi dan jaringan antar organisasi yang ada, dalam kaitannya dengan pelaksana program. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan munculnya rasa egoisme di antara organisasi pelaksana program yang dapat mempengaruhi hasil akhir dari suatu implementasi

b. Pengaturan birokrasi

Pengaturan birokrasi adalah proses pengangkatan staf atau pelaksana kebijakan sesuai dengan kompetensi dimana pengetahuan atau kemampuan dalam

keterampilan yang dimiliki oleh seorang pegawai yang relevan untuk menjalankan sebuah pekerjaan atau tugas yang harus dikerjakan.

c. Insentif

Insentife adalah suatu teknik untuk mendorong para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik.

4. Struktur birokrasi

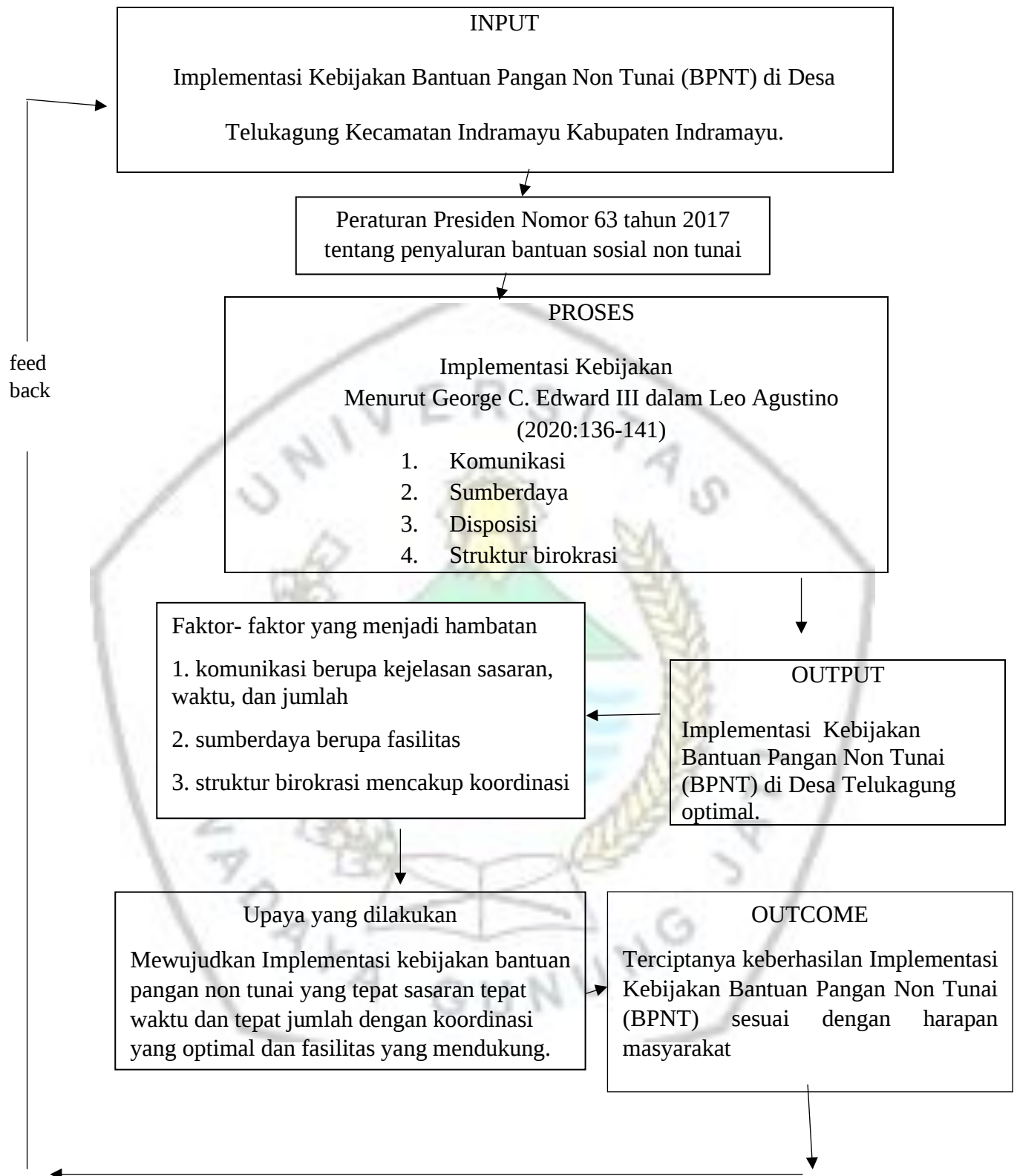
Struktur birokrasi untuk organisasi kearah yang lebih baik menurut Edward III dalam Agustino (2020;158) ada dua karakteristik yaitu :

a. *Standar Operasional Procedure (SOP)*

Suatu prosedur atau aktifitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

b. Fragmentasi

Fragmentasi adalah menyebar tanggungjawab sesuai dengan unit kerja dan bidang masing-masing bentuk dari fragmentasi yaitu berupa koordinasi antar organisasi.



Gambar 1. 1
Kerangka Pemikiran Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai.

1.7 Definisi Konsep Penelitian Dan Operasionalisasi Penelitian

1.7.1 Definisi Konsep Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pikir diatas maka fokus dalam konsep penelitian ini adalah implementasi kebijakan menurut Edward III yang meliputi :

1. Komunikasi dengan parameter Cara penyampaian kebijakan yaitu cara implementasi kebijakan bantuan pangan non tunai (BPNT) diberikan baik kepada pelaksana kebijakan maupun penerima kebijakan, parameter kedua yaitu kejelasan adalah informasi yang diberikan harus jelas kepada penerima kebijakan bantuan pangan non tunai baik kejelasan sasaran, kejelasan waktu dan kejelasan jumlah dan dan parameter yang terakhir yaitu konsistensi dimana informasi yang diberikan tidak boleh simpang siur sehingga tidak membingungkan penerima kebijakan implementasi kebijakan bantuan pangan non tunai (BPNT) di Desa Telukagung Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu.
2. Sumber daya dengan parameter sumberdaya manusia (staff) yaitu dilihat dari jumlah dan skil atau kemampuan yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan bantuan pangan non tunai, parameter ke dua adalah informasi adalah bentuk komunikasi antar organisasi dalam implementasi kebijakan bantuan pangan non tunai, dimensi ketiga adalah wewenang dimana pembagian tanggung jawab dan tugas dari para pelaksana kebijakan, dan parameter terakhir adalah fasilitas

yaitu sarana dan prasarana yang mendukung untuk melaksanakan kebijakan bantuan pangan non tunai di Desa Telukagung Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu.

3. Disposisi dengan parameter efek disposisi yaitu berupa komitmen yang dibuat antar organisasi pelaksana kebijakan bantuan sosial untuk mencapai suatu keberhasilan kebijakan, parameter yang ke dua adalah pengaturan birokrasi dimana penunjukan dari pelaksana kebijakan harus sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kebijakan itu sendiri, dan parameter terakhir yaitu insentif dimana keuntungan yang diperoleh oleh pelaksana kebijakan.
4. Struktur birokrasi dengan parameter *standar operasional procedures* (SOP) adalah berupa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan parameter terakhir yaitu fragmentasi berupa koordinasi antar pelaksana kebijakan untuk menjalankan implementasi kebijakan bantuan pangan non tunai.

1.7.2 Definisi Operasionalisasi Konsep Penelitian

Operasional Konsep Penelitian merupakan cara yang dilakukan untuk menjabarkan konsep penelitian kedalam beberapa dimensi dan parameter yang sesuai dengan teori yang digunakan, sehingga konsep tersebut bersifat konkrit dan dapat diukur.

Dalam operasionalisasi konsep penelitian ini peneliti perjelas dengan tabel dibawah ini :

Tabel 1. 1 Operasioanl konsep penelitian

Konsep	Dimensi	Parameter
Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edward III dalam Leo Agustino (2020:136-141)	1. Komunikasi	1. Cara penyampaian kebijakan 2. Kejelasan 3. Konsistensi
	2. Sumber daya	1. Staff 2. Informasi 3. Wewenang 4. Fasilitas
	3. Disposisi	1. Komitmen 2. Pengaturan birokrasi 3. Insentif.
	4. Struktur birokrasi	1. <i>Standar operasional procedures (SOP)</i> 2. fragmentasi

1.8 Motode Penelitian

1.8.1 Metode Penelitian Yang Digunakan

Metode yang digunakan adalah metode naturalistik dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan informan. Teknik pengumpulan

data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

1.8.2 Informan Dan Teknik Pemilihan Informan

Peneliti menggunakan informan kunci yaitu orang-orang yang paling banyak mengetahui tentang masalah yang diteliti. Teknik purposive sampling agar dapat menentukan informan penelitian.

1. Informan Kunci (*Key Informan*)

Informan kunci yaitu informan yang dapat memberikan informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Indramayu Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial dan Operator SIKS-NG Desa Telukagung dan salah satu ketua RT Desa Telukagung.

2. Informan Pendukung (*Supported Informan*)

Yaitu informan yang memiliki informasi permasalahan yang diteliti. Informan pendukung dalam penelitian ini yaitu masyarakat Desa Telukagung terdiri dari masyarakat penerima BPNT dan bukan penerima BPNT.

Tabel 1. 2
Informan dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai

No	Informan	Jumlah
1	Pegawai Dinas Sosial Kab.Indramayu Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1
2	Operator SIKS-NG Desa Telukagung	1
3	Salah satu ketua RT Desa Telukagung	1
4	Masyarakat penerima BPNT	2
5	Masyarakat bukan penerima BPNT	1

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2017: 224) “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data”. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian kualitatif, data dapat dikumpulkan pada *natural setting* (kondisi alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam (Sugiyono 2017 : 224-240) dapat menggunakan :

1. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Observasi

Nasution (Sugiyono, 2017 : 226) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung di lokasi penelitian.

2. Wawancara

Esterberg (Sugiyono, 2017 : 231) menyatakan bahwa, wawancara yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

3. Dokumentasi

Merupakan catatan atau peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau foto dan karya-karya monumental dari seseorang.

1.8.4 Teknik Pengujian Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2017) Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Lebih lanjut Sugiyono, membagi triangulasi ke dalam tiga macam, yaitu :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum

banyak masalah, akan memberikan data yang lebih absah sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

1.8.5 Teknik Analisi Data

Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengelola data, dimana data yang diperoleh dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Dalam model ini terdapat 3 (tiga) komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017: 247-252), ketiga komponen tersebut adalah:

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan makin lama peneliti di lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

2. Data Display (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

3. Conclusion Drawing and Vertification (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ada ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan data yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh buktibukti yang absah dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

1.9 Lokasi Dan Jadwal Penilitan

1.9.1 Lokasi Penelitian

Mengambil lokasi penelitian di Desa Telukagung dan kantor Kantor Dinas Sosial Kabupaten Indramayu. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Adanya permasalahan yang perlu dicari jalan keluarnya.
2. Adanya data yang mendukung dalam pelaksanaan penelitian.
3. Lokasi penelitian yang mudah dijangkau.

1.9.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini akan direncanakan selama 5 bulan di mulai pada bulan April 2022 dan berakhir pada bulan Agustus 2022 terselesaikannya hasil penelitian ini, dengan uraian jadwal penelitian sebagai berikut :



Tabel 1. 3
Jadwal Penelitian

[illegible]